



Menggagas Definisi Operasional Soal Pendidikan Multikultural

Ahmad Hufon¹, Cato², Muhammad Azka Maulana^{3✉}

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Indonesia^{1,2},

Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia³

E-mail : ahmadhufon@ibntegal.ac.id¹, catoingan@gmail.com², Aska.maulana@umc.ac.id³

Abstrak

Sejarah telah membuktikan bahwa salah satu faktor kunci yang mampu membangun kemajuan dan peradaban bangsa dimulai dengan rekonsiliasi terhadap keberagaman latar belakang antar golongan, suku, ras, agama dan budaya. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi makna definisi operasional dari multikulturalistik, keberagaman sehingga terciptanya budaya pluralism dalam konteks dunia pendidikan. Dengan teknik *literature review*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 5 dimensi yang perlu dipersiapkan guru dalam menerapkan pendidikan multikulturalisme, yakni (1) integrasi konten mata pelajaran (2) proses konstruksi ilmu pengetahuan, (3) mereduksi prasangka buruk, (4) pembelajaran berbasis keadilan, dan (5) memberdayakan budaya sekolah multikultural. 5 aspek tersebut menjadi dasar dalam munculnya rasa saling percaya (*trust*) dan komitmen untuk saling bekerja-sama menciptakan karya sebagai solusi permasalahan dari perspektif peserta didik. Yang kemudian mereka peserta didik memahami konsekuensi dari keberagaman budaya, etnis, suku, aliran (agama) menuju semangat kesamaan hak dan melahirkan budaya gotong-royong demi keadilan sosial yang merupakan solusi dari konflik antar-bangsa.

Kata Kunci: definisi operasional, pendidikan multikulturalisme, budaya.

Abstract

History has proven that one of the key factors capable of building progress and civilization of a nation begins with reconciliation of the diversity of backgrounds between groups, ethnicities, races, religions and cultures. This study seeks to explore the meaning of the operational definition of multiculturalism, and diversity to create a culture of pluralism in the context of the world of education. with a literature review technique. The results of this study indicate that 5 dimensions need to be prepared by teachers in implementing multiculturalism education, namely (1) integration of subject content (2) the process of science construction, (3) reducing prejudice, (4) justice-based learning, and (5) empowering multicultural school culture. These 5 aspects are the basis for the emergence of mutual trust and commitment to work together to create works as solutions to problems from the perspective of students. Then, they are students who understand the consequences of diversity in culture, ethnicity, ethnicity, and sect (religion) towards the spirit of equal rights and give birth to a culture of cooperation for social justice which is a solution to conflicts between nations.

Keywords: Operational definition, multiculturalism education, culture.

Copyright (c) 2022 Ahmad Hufon, Cato, Muhammad Azka Maulana

✉ Corresponding author

Email : Aska.maulana@umc.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3469>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Multikulturalisme berasal dari kata kultural yang berarti budaya, tambahan “multi” di awal berarti bermakna jamak dan isme berarti pemahaman. Sehingga secara garis besar multikulturalisme dapat diartikan pandangan untuk memahami banyak budaya. Kebudayaan yang dimaknai dalam konteks ini diartikan sebagai pedoman, baik tertulis maupun tersirat bagi pola tingkah laku di masyarakat. Pada definisi itu, maka di sini peran kebudayaan dapat diartikan sebagai perangkat ideologi yang menjadi alat bagi kesejahteraan hidup masyarakat (Suparlan & Parsudi, 2022). Maka pada kontek ini, masyarakat yang mengamalkan multikulturalisme adalah mereka yang mampu mengakui dan menghargai perbedaan dalam kesederajatan (*equity*) secara individual maupun kelompok masyarakat (Suparlan & Parsudi, 2022). Lebih lanjut, Banks (1984) mengungkapkan bahwa masyarakat yang sudah mengimplementasi multikulturalisme memiliki memandang kebudayaan lain dan kebudayaan dirinya sebagai *puzzle* yang perlu disusun satu dengan lainnya sehingga menjadi harmoni dan memiliki makna.

Masih menurut Banks (1984), sebenarnya jika dilihat secara historis menunjukkan bahwa konsep multikultural sudah dikenal sejak era 1960-an, bertepatan dengan munculnya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi hak-hak sipil terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas dan setelah itu berkembang menjadi politik *apharteid* yang digalakkan oleh bangsa Afro di Afrika Selatan. Kemudian, sosiolog Kymlicka (1999) berpandangan bahwa, multikulturalisme adalah ideologi yang berpedoman pada penegakkan hak-hak minoritas serta pengakuan dan penghargaan yang dilakukan oleh etnis mayoritas. Beberapa kata kunci dari nilai-nilai multikulturalisme yakni demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, aspek privat dan publik, hak asasi manusia dan hak budaya komunitas.

Namun sebagai sebuah ideologi, terkadang dalam mendefinisikan multikulturalisme secara operasional menjadi sulit untuk dilakukan pada jenjang Pendidikan formal (PAUD/SD/SMP/SMA). Khususnya pada implementasi kelas dan mata pelajaran atau tema berbasis multikultural. Pada studi ini, penulis mencoba mengeksplorasi konsep multikulturalisme sehingga menjadi pedoman praktis oleh guru dalam pengelolaan kelas dan ataupun mata pelajaran atau tema kepada peserta didik.

Seperti dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, bahwa pendidikan multikulturalisme, merupakan Pendidikan yang bertujuan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.

Azra (2013) mengkritik proses pendidikan formal seperti “*menara gading*” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Sehingga menurutnya, Pendidikan perlu membebaskan peserta didik dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya. Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa Pendidikan merupakan solusi untuk menuntaskan persoalan sosial seperti penindasan, kebodohan, sampai pada tingkat ketertinggalan. Sesuai dengan amanat undang-undang pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang kemudian dituntaskan dengan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Jika ditelisik dari sejarah multikulturalisme di Eropa, Andersen dan Cusher (1994) menjelaskan bahwa pendidikan multikulturalisme diawali dengan berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” sesuai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran “interkulturalisme” ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Santrock (2004) berpendapat bahwa fokus pendidikan multikultural yang berlandaskan pada sikap peduli dan menghargai perbedaan setiap individu (*individual differences*). Pendidikan multikultural sering juga

disebut Pendidikan inklusif yang artinya tidak hanya berfokus pada latar belakang ras, suku, dan agama semata, namun juga kekurangan dan kelebihan peserta didik lainnya. Menurut Abdillah (1993), Pendidikan multikultural secara mulia memiliki tujuan untuk meningkatkan semangat toleransi tentang perbedaan ethno-kultural, agama, kepribadian individu, kemampuan individu sebagai upaya mengurangi diskriminasi.

Menurut Azra (2013) sejauh ini terdapat lima model dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di negara-negara maju, yakni: pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Keempat, pendidikan dwi-budaya. Kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia sebagai upaya memahami perbedaan individual.

Sejalan dengan itu, Ainul Yaqin (2005) mengungkapkan bahwa Pendidikan multikultural merupakan upaya untuk mewujudkan “*Education for All*”. Pendidikan multikultural (*multikultural education*) juga merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa (Blum, A. Lawrence, 2001). Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama (Dawam, 2003).

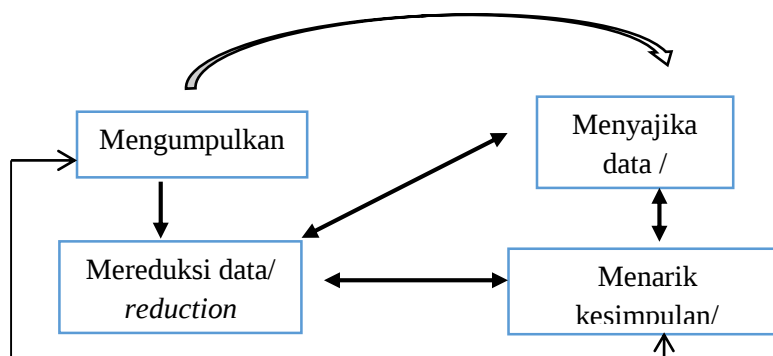
METODE PENELITIAN

Paper ini disusun berdasarkan studi literature review, yang artinya penulis menganalisis artikel relevan terkait Pendidikan multikultural. Adapun paper yang digunakan untuk menganalisis didapatkan oleh tiga database, yakni, *Pubmed*, *Google Scholar* dan *Science Direct*. Dengan memasukan kata kunci “multiculturalism”, “multikultural+education”, “multikulturalisme”, “pendidikan+multikultural”. Artikel yang digunakan adalah 18 *paper*. Langkah-langkah penelitian studi literatur mengacu pada karya Nasution, N., Yaswinda, Y., & Maulana, (2019; Pitaloka et al., 2021; Purwati et al., 2022) adalah sebagai berikut;



Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian Studi Pustaka

Selanjutnya, peneliti melakukan teknik analisis data yang mengacu pada buku Sugiyono (2015) dengan teknik atau cara; mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan terkait topik yang sedang dibahas. Alur analisis tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar dibawah ini:



Gambar 2: alur analisis data (Sugiyono, 2013; Faiz & Soleh; Faiz et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pendidikan multikultural merupakan proses yang tujuan utamanya adalah mengubah struktur sosial masyarakat melalui perubahan kultur sekolah yang diisi oleh beragam etnis maupun kelas sosial (Banks, 1984). Ada 5 (lima) dimensi pokok dalam pendidikan multikultural, yakni: (1) integrasi konten mata pelajaran (2) proses konstruksi ilmu pengetahuan, (3) mereduksi prasangka buruk, (4) pembelajaran berbasis keadilan, dan (5) memberdayakan budaya sekolah multikultural.

Tabel. Penjelasan Definisi Operasional Sekolah Multikultural

No	Dimensi		Indikator	Penanggung-jawab
1.	Integrasi Pelajaran	Konten mata	- Integrasi tematik budaya di setiap mata pelajaran	Guru
2.	Proses Pengetahuan	Konstruksi Ilmu	- Guru mampu mengevaluasi kematangan konstruksi ilmu pengetahuan setiap siswa - Guru menyiapkan bahan ajar - <i>Discovery learning</i> oleh siswa - <i>Project learning</i> - Diskusi kelas - <i>Collaboration learning</i>	Guru
3.	Mereduksi Prasangka buruk		- <i>Education for all</i> menerima murid secara inklusif	Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan (Seluruh Komponen Sekolah)
4.	Pembelajaran Keadilan	Berbasis	- Memfasilitasi murid yang berbeda (minoritas) pelajaran keagamaan, pelajaran budaya (misal, Bahasa Jawa/Sunda/Mandarin/Arab) - Memfasilitasi bakat-minat kemampuan setiap siswa - <i>Competitive learning</i> berubah menjadi <i>collaborative learning</i> . - Tidak ada urutan ranking di setiap kelas, namun menonjolkan karakteristik individu	Kepala Sekolah dan Guru
5.	Memberdayakan Sekolah Multikultural	Budaya	- Keempat dimensi tersebut dilakukan dengan konsisten dan sustainable serta	Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan (Seluruh Komponen)

	dievaluasi tahunnya	setiap	Sekolah)
--	------------------------	--------	----------

Kelima dimensi operasional tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Secara operasional, kelima dimensi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Integrasi konten mata pelajaran, pada dimensi ini, guru berupaya untuk mengintegrasikan mata pelajaran dengan pembahasan mengenai kesamaan dan kesetaraan (*equity and equality*) hak dihadapan hukum antar individu, golongan dan kelompok, baik mayoritas maupun minoritas. Informasi terkait kebhinekaan tersebut juga perlu masuk dalam mata pelajaran sosial, bahasa, eksakta, ilmu alam atau dalam sebuah tema pembelajaran di kelas (Idris, 1987). Pada pelajaran matematika misalnya bisa dikenalkan konsep etnomatika kepada peserta didik. Soal cerita matematika misalnya menambah unsur kebhinekaan budaya. Pesan multikultural ini, perlu disematkan pada mata pelajaran, sehingga peserta didik dapat mengambil makna multikultural di setiap pelajaran. Terlebih, mata pelajaran Bahasa dan Ilmu Sosial sangat sesuai jika dimasukkan materi pesan kebhinekaan dan multikultural (Skeel, 1995). Realitanya, dalam kurikulum 2013 (Kurtilas) telah menambahkan dimensi sikap pada Kompetensi Inti (KI), maka selaras dengan itu setiap pelajaran sangat mungkin jika diberi tambahan KI sikap multikultural. Beberapa kegiatan kelas yang dapat memenuhi indikator sikap kebhinekaan adalah dengan belajar berkelompok di mana setiap anggota kelompok memiliki keberagaman latar belakang (ras, budaya, suku dan agama), kelas sosial, kemampuan serta keberagaman karakteristik individu lainnya (Baidhawi, 2005). Lebih lanjut, perencanaan pembelajaran dan materi pembelajarannya tidak perlu dirubah. Melainkan, guru juga perlu menambahkan materi isu sosial khusus isu kebhinekaan yang dikaitkan dengan materi mata pelajaran (Suparta, 2008)
- 2) Dimensi proses konstruksi pengetahuan, dimensi ini mencakup tugas guru untuk membantu peserta didik dalam memahami persepsi dalam proses merumuskan kesimpulan. Bagaimana peserta didik memaknai setiap mata pelajaran dan mengambil hikmah dalam setiap materi pelajaran. Pada dimensi ini menakar seberapa kuat para siswa memahami ilmu pengetahuan yang diterimanya dalam sebuah proses pembelajaran. Disinilah tugas guru dalam mengevaluasi perspektif peserta didiknya, tidak hanya dengan *quiz*, ulangan harian, ujian tengah semester atau akhir semester, melainkan guru dapat menemukan keunikan siswa dalam setiap pertemuan pembelajaran.

Keberhasilan guru dalam mengevaluasi pengetahuan siswa tergantung dari kemampuan guru dalam manajemen kelas dan eksplorasi kognitif peserta didik. Maka dalam dimensi ini, baik pada level PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, guru tidak hanya bertugas memberikan materi, namun juga terdapat proses resiprokal di mana peserta didik juga berhak mengeksplorasi pengetahuan sendiri dengan difasilitasi oleh guru. Maka pandangan bahwa murid merupakan galon kosong yang tidak berisi air sehingga guru wajib mengisinya, tidak berlaku jika guru memahami dimensi ini. Bahkan tidak jarang kita mendapatkan situasi di mana guru mendapatkan ilmu pengetahuan dari interaksi antar siswanya.

Fasilitas guru dalam menstimulasi konstruksi pengetahuan siswa, bisa dilakukan dengan menyusun buku bahan ajar, mendorong suasana belajar *outing/outbound/out-class*, menyediakan suasana diskusi, serta menyediakan waktu bagi siswa untuk membaca bahan terlebih dahulu sebelum kelas dimulai. Maka, guru dapat mengukur bahwa siswa yang berperan aktif dalam proses tersebut memiliki konstruksi pengetahuan yang kuat terhadap materi pembelajaran.

Kaitannya dengan pembelajaran multikultural, adalah ketika proses penguatan konstruksi ilmu pengetahuan siswa terhadap suatu materi sudah kuat, maka guru akan lebih mudah menyimpulkan hikmah materi pelajaran dengan dihubungkan dengan fenomena multikultural. Misal, dalam materi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mengenai konsep energi, jika guru dapat memastikan bahwa pemahaman peserta didik sudah matang, maka di akhir materi siswa akan lebih mudah memahami mengenai bahwa sumber daya alam di bumi

ini akan habis, maka dibutuhkan kolaborasi antar negara, antar bangsa dalam upaya menemukan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Di sinilah proses, inklusifitas, bahwa esensi dari manusia adalah untuk ta'awun demi menyelesaikan permasalahan. Tanpa mengenal, suku, ras, atau agama tertentu, mayoritas, minoritas, kita perlu sadar bahwa kerusakan bumi dan kehabisan energi menjadi tanggung-jawab bersama (Slavin, 1985). Maka disinilah suatu model pembelajaran yang dikenal dengan nama pembelajaran kooperatif (*cooperative-learning*).

3) Dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*), pada aspek ini, beberapa prasangka yang diturunkan dari generasi ke generasi wajib kita *counter*. Misal, khusus di Indonesia, sejak masa orde baru, kaum mayoritas relative memiliki prasangka kurang baik terhadap etnis *Indo-China*. Maka disini, guru wajib memberikan pencerahan dalam upaya mengurangi bahkan bisa mentralkan prasangka tersebut (Driyarkara, 1980). Maka disini, diperlukan kewajiban bagi sekolah negeri untuk menerima seluas-luasnya etnis mayoritas. Bahkan, pemerintah bisa memberikan rekomendasi bagi sekolah swasta yang memiliki ideologi keagamaan tertentu untuk menerima siswa yang berasal dari agama yang berbeda. Hal ini adalah upaya agar peserta didik bisa saling mengenal satu dengan lainnya dan terhindar dari prasangka. Beberapa teori menyatakan, bahwa prasangka itu muncul karena manusia kerap bersikap eksklusif hanya dengan golongannya saja.

Pemerintah perlu menjadi suri tauladana. Mengajak seluruh komponen bangsa Bersatu-pada, khususnya dalam proses pendidikan. Mengimplentasikan slogan "*education for all*" tidak hanya kata-kata semata, namun dibuktikan dengan membudayakan sekolah inklusif untuk semua. Maka tidak ada lagi sekolah yang eksklusif hanya untuk golongan tertentu saja. Beberapa contoh pendidikan ber-ideologi Islam yang sukses mengadakan pendidikan inklusif adalah pendidikan Muhammadiyah. Mengacu pada data, Universitas Muhammadiyah Kupang merupakan perguruan tinggi berasaskan Islam namun lebih dari 90% mahasiswanya berasal dari agama Kristen.

Denngan seluruh siswa dari berbagai agama, suku, etnis dan budaya, maka akan timbul proses pengurangan prasangka buruk terhadap sesama. Tentu, hal ini juga diperlukan kompetensi guru dalam mereduksi konflik yang mungkin akan muncul dari peserta didik dengan latar belakang mayoritas dengan minoritas, bahkan mungkin perilaku *bullying* pun akan muncul. Namun, ketika peran guru dalam memberikan nilai-nilai pendidikan multikultural dapat berjalan, maka keberhasilan akan lebih nampak dibandingkan permasalahannya.

4) Dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*), pada dimensi ini, sekolah mampu mempromosikan kampanye "*Zero-Discrimination*". Sekolah yang ramah untuk semua anak, semua golongan dan semua agama, baik mayoritas maupun minoritas. Pendidikan yang adil artinya setiap siswa memiliki kesamaan hak untuk belajar, tidak ada yang lebih superior, ataupun inferior satu dengan yang lainnya. Bahkan, pelajaran budaya juga bisa sebagai pilihan, misal mata pelajaran bahasa Jawa, Sunda, Mandarin atau Arab bisa dijadikan pilihan sesuai dengan minat atau latar belakang siswanya. Tentu, sekolah harus memfasilitasi pelajaran agama sesuai dengan keyakinan peserta didik.

Dimensi ini juga bisa dimaknai sebagai perubahan cara pandang konvensional, di mana dalam konteks sekolah, setiap siswa berlomba-lomba untuk menjadi paling unggul di kelas, melainkan setiap siswa bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sistem ranking rata-rata per mata pelajaran pun bisa diubah menjadi pelaporan raport yang lebih humanis berdasarkan karakteristik unik individu peserta didik. Maka, cara pandang *competitive-learning* kita ubah menjadi *collaboration-learning*. Sekolah yang ramah dan nyaman bagi semua golongan, semua karakteristik individu dan semua perbedaan menyatu dalam sebuah proses pendidikan yang adil dan humanis.

- 5) Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*), dimensi terakhir, yakni dimensi yang berupaya untuk merawat budaya baik di sekolah. Seperti proses sosial yang dunia alami, bahwa tidak relevan lagi ada sistem kasta, mayoritas superior, minoritas inferior dalam sebuah komunitas, bangsa dan negara. Maka sebagai unit pendidikan, sekolah perlu merawat budaya inklusif yang multikultural (Maslikhah, 2007). Dalam hal ini seluruh komponen sekolah wajib ambil bagian dalam membangun iklim inklusif dari mulai kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan satpam sekolah harus melek akan inklusifitas multikultural (Maksum & Ruhendi, 2004)

Dari lima dimensi tersebut diatas dapat dipahami bahwa, pendidikan multikultural ini adalah dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk.

KESIMPULAN

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari pendidikan Islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Kelima kebutuhan yang primer ini disebut dengan istilah Al-Daruriyat al-Khamsah atau dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-Maqasid al- Khamsah, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Penelitian ini, bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk dapat mendampingi dan mengawasi kurikulum Merdeka Belajar yang tengah dimulai di setiap sekolah di republik ini. Pada hakikatnya, kurikulum Merdeka memiliki falsafah yang berkesesuaian dengan Pendidikan multikultural. Sehingga jika amanat undang-undang ini dijalankan, maka bangsa Indonesia relatif lebih bersatu demi tujuan kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (1993). *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*.
- Ainul Yaqin, M. (2005). *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*.
- Andersen dan Cusher. (1994). *Multikultural and Intercultural Studies*” dalam C. Marsh (ed), *Teaching Studies of Society and Environment*.
- Azra, A. (2013). *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*.
- Baidhawi, Z. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*.
- Banks, J. (1984a). *Teaching Strategies For Ethnic Studies*.
- Banks, J. (1984b). *Teaching Strategies For Ethnic Studies*.
- Blum, A. Lawrence, A. (2001). *Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural, dalam Larry May, dan Shari Colins- Chobanian, Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural, Alih Bahasa : Sinta Carolina dan Dadang Rusbi*.
- Dawam, A. (2003). *“EMOH” Sekolah: Menolak “Komersialisasi Pendidikan” dan “Kanibalisme Intelektual” menuju Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press.
- Driyarkara. (1980). *Tentang Pendidikan*.
- Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1544–1550.

- 5761 *Menggagas Definisi Operasional Soal Pendidikan Multikultural – Ahmad Hufron, Cato, Muhammad Azka Maulana*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3469>
- Faiz, A., & Soleh, B. (2021). Implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, 7(1), 68–77. <https://doi.org/10.22219/jinop.v7i1.14250>
- Idris, Z. (1987). *Dasar-Dasar Kependidikan*.
- Kymlicka, W. (1999). “*Mitsunderstanding Nationalism*” dalam *Theorizing Nationalism* (R. Beiner (ed.)).
- Maksum, A., & Ruhendi, L. Y. (2004). *Paradigma pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modernisme*.
- Maslikhah. (2007). *Quo Vadis Pendidikan Multikultural: Rekonstruksi Sistem Pendidikan berbasis Kebangsaan*.
- Nasution, N., Yaswinda, Y., & Maulana, I. (2019). Analisis Pembelajaran Berhitung melalui Media Prisma Pintar pada Anak Usia Dini. *Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 240.
- Pitaloka, D. L., Dimyati, D., & Purwanta, E. (2021). Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Toleransi pada Anak Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1696–1705. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.972>
- Purwati, Darisman, D., & Faiz, A. (2022). Tinjauan Pustaka: Pentingnya Menumbuhkan Nilai Toleransi dalam Praksis Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3729–3735.
- Santrock. (2004). *Psikologi Pendidikan*.
- Skeel, D. J. (1995). *Elementary Social Studies: Challenge for Tomorrow's World*.
- Slavin, R. E. (1985). Cooperative learning: Applying contact theory in desegregated schools. *Journal of Social Issues*, 41(3), 45-62.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta., April 2015, 31–46. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Suparlan, & Parsudi. (2022). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural,” Makalah. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3,. *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Suparta, M. (2008). *Islamic Multikultural Education: Sebuah Refleksi Atas pendidikan Agama Islam di Indonesia*.